



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Perkuat Alat Bukti Dugaan Korupsi Bungin, Cek Fisik

**LEBONG** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bungin, Kecamatan Bungin Kuning tahun anggaran (TA) 2017-2022.

Untuk memperkuat alat bukti, hari ini, Kamis 4 Juli 2024, jaksa Kejari Lebong akan turun ke lapangan melakukan pengecekan kegiatan fisik yang ada di Desa Bungin yang didanai DD TA 2017-2022.

"Yang akan kita cek besok (Kamis, Red) kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, siring irigasi dan kegiatan lainnya," jelas Kajari Lebong melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Robby Rahditio Dharma, SH, MH.

Dalam pengecekan kegiatan fisik ini, jaksa akan dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Lebong dan Inspektorat Daerah (Ipda) Lebong.

Mengecek keberadaan fisik hasil dari kegiatan yang didanai DD Bungin, kemudian dicocokkan kesesuaiannya dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah dipegang jaksa.

"Dari kegiatan tahun 2017 sampai 2022, kita akan pastikan apakah kegiatan fisik benar-benar ada. Akan kita cocok dengan RAB dan gambar yang telah kita miliki," tutur Robby.

Dijelaskan Robby, sebelum dilakukan pengecekan fisik di lapangan, jaksa telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait kegiatan realisasi Dana Desa Bungin. Diantaranya masyarakat setempat, perangkat desa, dan dari pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari Desa Bungin.

Pemeriksaan saksi-saksi akan kembali dilanjutkan setelah dilakukan pengecekan fisik atau hasil pekerjaan yang didanai DD Bungin..

"Sudah 30 saksi kita periksa. Jumlah saksi ini akan terus bertambah, karena akan ada pemeriksaan saksi-saksi lagi usai pengecekan fisik di lapangan," jelasnya.

Diakui Robby, sejauh ini hasil pemeriksaan saksi-saksi sudah menjurus ke calon tersangka. Kejari Lebong menargetkan dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan tersangka.

"Untuk calon tersangka itu sudah menjurus. Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita tetapkan sebagai tersangka," sampainya.

Sedangkan untuk penghitungan Kerugian Negara (KN), disebutkan Robby, Kejari akan melibatkan auditor.

Untuk diketahui, sprint penyelidikan dugaan korupsi dana desa Bungin dikeluarkan sejak 3 Mei 2024 lalu.

Saat ini Pidsus Kejari Lebong sudah memeriksa kurang lebih 10 orang saksi.

Kasus ini mencuat setelah Kejari Lebong menerima laporan dari masyarakat atas dugaan korupsi penggunaan DD/ADD Desa Bungin tahun anggaran 2017-2022.

Laporan itu ditindaklanjuti oleh Tim Intelijen Kejari Lebong melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Setelah mendapati indikasi perbuatan korupsi yakni ditemukan potensi yang berpotensi Kerugian Negara (KN) yang timbul dari penggunaan DD/ADD tersebut, Seksi Intelijen menaikkan kasus ini ke Seksi Pidsus yang kemudian melanjutkan penyelidikan.

Untuk estimasi Kerugian Negara dalam kasus ini, jaksa belum mau menyebutkan, karena angkanya belum pasti masih akan dilakukan perhitungan oleh auditor.

Secara keseluruhan total anggaran DD/ADD Bungin dari 2017-2022 mencapai Rp5 Miliar. (eng)